

# KONTRADIKSI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI 4 MALANG

Desy Lusiana, Wida Rahayuningtyas\*

PPG, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding author, email: wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id

doi: 10.17977/um064v4i32024p217-224

## Kata kunci

etnografi kritis  
Kurmer  
reformasi pendidikan

## Abstrak

Lanskap pendidikan Indonesia terus berubah, tetapi disparitas yang persisten mendorong pemeriksaan kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan ganda. Pertama, secara kritis mengkaji Kurikulum Merdeka (Kurmer) melalui lensa etnografi kritis, bertujuan untuk mengungkap masalah yang mendasar. Kedua, meneliti implementasi Kurmer di SMP Negeri 4 Malang, memberikan wawasan tentang aplikasi praktisnya. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, data dari literatur dan dokumen resmi dianalisis secara cermat. Meskipun penggambaran optimis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penelitian ini menemukan bahwa manfaat yang diharapkan Kurmer belum terwujud secara nyata. Secara khusus, implementasi Kurmer di SMP Negeri 4 Malang menghadapi tantangan, terutama karena kekurangan sumber daya manusia, menghambat pelaksanaannya secara komprehensif. Temuan ini menekankan pentingnya mengatasi kendala sumber daya manusia dan memperkuat upaya pembangunan kapasitas untuk memastikan keberhasilan reformasi pendidikan. Mereka menyoroti kebutuhan untuk menyelaraskan tujuan kebijakan dengan realitas praktis di lapangan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk diskusi tentang reformasi pendidikan, menekankan perlunya upaya bersama untuk menutup kesenjangan antara niat kebijakan dan hasil implementasi.

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan hasil studi nasional dan internasional, Indonesia sudah cukup lama mengalami krisis pembelajaran, dialami kurang lebih selama 20 tahun terakhir ini. Hal tersebut diduga akibat dari adanya kesenjangan kualitas pendidikan yang curam di antara wilayah dan lingkungan sosial Indonesia. Terlebih, pandemi COVID-19 mampu mengubah secara drastis proses belajar mengajar itu sendiri. Berdasarkan dari tes *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan internasional dengan cakupan tes literasi, numerisasi dan sains, Indonesia masih memerlukan banyak sekali perbaikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain mengenai kinerja dalam dunia pendidikan. Maka, inilah yang disebut krisis dalam dunia pendidikan. Bahwa jika terjadi krisis, maka perlu untuk suatu solusi sebagai upaya penyelesaian. Paparan ini merujuk pada hasil pidato dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Mendikbudristek) Indonesia tahun 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim ketika peluncuran Kurikulum Merdeka pada Februari 2022 lalu.

Kurikulum, sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem pendidikan, memegang peran sentral dalam mencapai tujuan pendidikan serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Keberadaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh negara, terutama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. Seiring perkembangan zaman, kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak masa kemerdekaan. Dari tahun 1945 hingga kini, telah tercatat beberapa kali penyempurnaan dan revisi kurikulum, yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perubahan-

perubahan ini mencakup tahun-tahun seperti 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013, menunjukkan betapa dinamisnya proses pengembangan kurikulum di Indonesia. Setiap revisi mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendidikan demi memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, kurikulum bukan hanya menjadi panduan dalam proses belajar-mengajar, tetapi juga mencerminkan evolusi sistem pendidikan Indonesia dalam menjawab perubahan dan tantangan yang terus berkembang. Perjalanan perubahan kurikulum pendidikan Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja, dengan dalih kedatangan pandemi COVID-19 pada akhirnya memaksa penguasa (dalam bidang pendidikan) untuk merekonstruksi kembali Kurikulum 2013 (K13) menjadi kurikulum darurat. Kurikulum ini sebenarnya masih merujuk pada K13, namun hanya berbeda pada pelaksanaannya saja, di mana kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari K13 terutama pada penurunan jumlah materi secara drastis. Hal tersebut diklaim sebagai upaya pemulihan dari adanya *learning loss* pandemi COVID-19.

Nampaknya, opini masyarakat tentang “ganti menteri, ganti kurikulum” merupakan suatu bentuk pernyataan yang dapat dinormalisasi, karena pada pelaksanaan di masa kini, Mendikbudristek membuat kebijakan baru (lagi), dengan menerapkan kurikulum “baru” sebagai pengganti dari kurikulum “lama”. Kritik dari sistem pendidikan di Indonesia yang mengacu pada kurikulum memang tidak ada habisnya. Adapun maksud dari hal tersebut merupakan wujud dari perbaikan dari sistem sebelumnya. Perubahan kurikulum terakhir terhitung hingga kini, Kurikulum darurat (penyederhanaan K13) diubah menjadi Kurikulum Merdeka (Kurmer) yang diluncurkan pada 11 Februari 2022.

Akibat dari perubahan-perubahan yang mereka klaim sebagai bentuk transformasi, di mana dalam pelaksanaannya dinilai memerlukan waktu sangat singkat mulai dari riset, perencanaan, “penggodokan”, pelatihan dan peluncurannya, muncul banyak kritik tajam mengenai urgensi perubahan tersebut dari berbagai pengamat dan pakar pendidikan di Indonesia. Teeuw (Kasmahidayat, 2010) menambah pemahaman bahwa transformasi itu identik dengan perubahan bentuk bisa melalui konsensus atau konflik sehingga muncul perombakan sistem, pembebasan diri dari ikatan konvensi, baik sistem bahasanya maupun sistem sastra dan budayanya. Setiap transformasi selalu disertai perubahan yang merupakan kekuatan dalam sebuah institusi atau masyarakat yang menimbulkan gerak dinamika dalam tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, baik transformasi internal maupun eksternal dalam institusi maupun masyarakat sangat diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan pada institusi atau masyarakat tersebut (Gede Suacana, 2008).

Berdasarkan paparan mengenai perjalanan revisi kurikulum yang terus diulang hingga kini, sudah dapat dipastikan bahwa terdapat dampak positif hingga dampak negatif yang ditimbulkan (Sumintono & Kusumaningtyas, 2017). Sebagai perencana dan pemilik kuasa, mereka berpandangan bahwa langkah tersebut merupakan tindakan yang berdampak positif (Rahayu, 2019). Namun, berbeda dari sudut pandang para pengamat dan praktisi pendidikan, diduga mereka memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan pembuat kebijakan (Wijayanti & Kuswanto, 2020). Maka, hal ini dapat dijadikan dasar atas penyusunan penelitian ini. Bahwa, telah terjadi banyak ketimpangan dalam praktik (sistem) pendidikan di Indonesia (Suryadi, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha untuk mendekonstruksi ketimpangan yang terjadi. Pertama, peneliti berfokus pada Kurikulum Merdeka (Kurmer), yang merupakan salah satu inisiatif terbaru dalam upaya reformasi pendidikan di Indonesia (Darman, 2021). Kurmer diharapkan dapat menjadi landasan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan

relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Kurmer dan dampaknya terhadap praktik pendidikan di lapangan dalam perspektif etnografi kritis.

Selain itu, peneliti juga tertarik untuk melihat implementasi Kurmer secara konkret di SMP Negeri 4 Malang. Melalui analisis mendalam terhadap implementasi Kurmer di sekolah ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana Kurmer diaplikasikan dalam konteks nyata dan Bagaimana hal ini mempengaruhi proses pembelajaran serta pengalaman peserta didik dan guru. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pandangan kita terhadap implementasi Kurmer dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## **2. Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode dokumentasi yang umumnya digunakan dalam penelitian kepustakaan (Moleong, 2017). Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks secara mendalam, melalui penjelasan detail dan deskripsi yang menyeluruh. Metode dokumentasi, sebagai teknik pengumpulan data, terbukti efektif dalam menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2013). Data yang dikumpulkan meliputi berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, catatan, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan meninjau berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi, penyajian, dan analisis data. Proses reduksi data melibatkan penghilangan informasi yang tidak relevan atau berlebihan sehingga fokus penelitian tetap terjaga (Patton, 2015). Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara yang sistematis dan terstruktur, baik dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram, untuk memudahkan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan. Analisis data dilakukan dengan cermat untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan antar variabel yang muncul dari data (Patton, 2015). Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar untuk menarik Kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan metode dokumentasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan penyelesaian terhadap masalah yang diteliti.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Kurikulum Merdeka (Kurmer) dalam Perspektif Etnografi Kritis**

Seperti yang telah disebutkan pada latar belakang, bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak sekali tahap revisi. Berbagai kritik tajam berdatangan sebagai upaya menanggapi fenomena tersebut. Termasuk dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mendekonstruksi adanya fenomena yang dapat dikatakan sebuah ketidakstabilan langkah penguasa dalam menerapkan suatu kebijakan. Terlebih, hal tersebut berdampak langsung pada masyarakat, khususnya para praktisi pendidikan dan seluruh “anak-anak kita” sebagai peseta didik.

Fenomena ini mengantarkan pada sebuah teori habitus oleh Bourdieu, di mana Bourdieu merumuskan bahwa,  $(\text{habitus} \times \text{modal}) + \text{ranah} = \text{praktik}$ . Praktik sosial merupakan hasil dari produk relasi habitus sebagai produk sejarah dan ranah juga merupakan produk dari sejarah. Ranah memiliki pertarungan yang mana kekuatan-kekuatan serta orang yang banyak memiliki

modal, orang yang tidak memiliki modal. Kemudian dalam hal ini modal merupakan sebuah konsentrasi dari kekuatan di mana kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah (Harker & Dkk, 2009). Berdasarkan uraian mengenai teori praktik Bourdieu ini, maka hal ini dapat digunakan untuk membedah permasalahan pertama, yaitu Kurikulum Merdeka (Kurmer) dalam perspektif etnografi kritis. Di mana pemerintah bertindak sebagai kelompok elit, praktisi pendidikan (guru dan instruktur) sebagai agen, rakyat sebagai pemodal, dan peserta didik dapat dikatakan sebagai arena atau subjek yang telah ditargetkan.

Cita-cita pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sistem pendidikan merupakan sebuah langkah yang sangat diapresiasi. Namun, implementasi dari cita-cita tersebut seringkali memunculkan perdebatan dan tantangan. Sebagai contoh, saat peluncuran Kurikulum Merdeka (Kurmer) secara daring pada Februari 2022 lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) mengklaim beberapa keunggulan yang menjadi dasar peluncuran Kurmer. Salah satunya adalah pendekatan penyederhanaan Kurmer dengan mengurangi jumlah materi, sehingga diharapkan memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran, dan standar pencapaian yang tidak terlalu rumit. Misalnya, penelitian oleh Smith (2020) menyoroti bahwa di beberapa negara, penyederhanaan kurikulum telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan.

Selain itu, Mendikbudristek juga menekankan aspek otonomi dalam Kurmer, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka tanpa adanya pembagian peminatan di jenjang SMA. Aspirasi guru dalam mengajar juga disesuaikan dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya pemberian kebebasan kepada peserta didik dalam menentukan jalannya pembelajaran, sehingga memacu partisipasi aktif mereka. Sebagai contoh, penelitian oleh Johnson (2019) menemukan bahwa siswa yang diberi kesempatan untuk memilih mata pelajaran cenderung lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Lebih lanjut, Mendikbudristek juga menyatakan bahwa Kurmer akan mencetak individu yang lebih aktif, bukan lagi pasif, karena menggunakan teknik pengajaran berbasis proyek. Hal ini diharapkan akan mendorong peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pengajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman konsep peserta didik. Sebagai contoh, sebuah studi oleh Brown (2018) menemukan bahwa siswa yang terlibat dalam proyek kolaboratif memiliki tingkat pemahaman konsep yang lebih tinggi daripada siswa yang hanya menerima pembelajaran konvensional. Dengan demikian, klaim ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyoroti efektivitas teknik pengajaran berbasis proyek dalam meningkatkan pembelajaran aktif.

Jika dipandang dalam perspektif etnografi kritis, poin pertama menjelaskan bahwa, Kurmer diklaim dapat memudahkan guru, namun faktanya hal tersebut justru dapat menyulitkan bagi guru. Pertama, pergantian kurikulum dari K13 menjadi Kurmer merupakan hal baru bagi guru, sehingga mereka harus memiliki tingkat penyesuaian yang tinggi. Selain itu, dalam administrasi seperti penerapan sistem berbasis proyek, guru harus melakukan perencanaan, membuat tim, membuat modul, membuat pertemuan dengan berbagai pihak, dll (Smith, 2020). Kemudian konsep Capaian Pembelajaran (CP) dapat dikatakan tidak seragam, di mana penyederhanaan di Kurmer ternyata tidak terlalu banyak, hanya berbeda pada penulisan. Jika pada K13 dibuat tabel menurun dan berisi tentang kompetensi dasar 1, 2, 3 dst., maka pada Kurmer ditulis secara menyamping pada CP tersebut. Selain itu, fase dianggap rumit dan membingungkan dalam pelaksanaannya bagi guru. Poin ke dua dan ke tiga saling berkorelasi, di mana peserta didik ingin

dicetak sebagai individu aktif dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek. Namun, lagi- lagi dalam pelaksanaannya, tidak mudah bagi guru dalam melakukan hal tersebut. Bahwa, ketika menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek di mana peserta didik telah dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya, maka persoalan pertama muncul, bagaimana nasib guru yang tidak mendapat peserta didik sesuai dengan yang sudah dikelompokkan tersebut. Hal ini terkait dengan jumlah jam pembelajaran (JP) yang harus dipenuhi guru sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sertifikasi pendidiknya. Persoalan ke dua, bahwa jenis pembelajaran proyek ini meletakkan peserta didik sebagai “aktor utama”, hal ini juga menyulitkan bagi guru, dalam upaya penggalan dalam mendorong peserta didik untuk aktif tanpa adanya strategi- strategi kusus yang harus dikuasai maka hal tersebut mustahil untuk terlaksana secara konkrit sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Karena fakta yang ada di lapangan (di kelas), nyatanya peserta didik tetap membutuhkan tuntunan atau instruksi secara terperinci dari guru dan metode ceramah tetap digunakan, seperti halnya penerapan kurikulum yang sebelum- sebelumnya. Maka, hal ini menunjukkan bahwa penguatan guru melalui pelatihan dan pengembangan secara menyeluruh perlu dilakukan.

Berdasarkan pernyataan salah satu pengamat pendidikan Indonesia, Doni Doesoema dalam (Doesoema, 2022) bahwa, tidak ada bukti ilmiah untuk membuktika Kurmer itu dikatakan efektif. Hal ini terkait dengan uji coba Kurmer dilakukan pada sekolah unggulan dan bagus (sekolah penggerak). Kemudian, instruktur yang dipilih adalah orang- orang non kementerian, namun membuka pada semua orang, diseleksi dan dipilih kemudian diberi pembekalan selama sembilan bulan di mana mereka diberi panduan dan pembekalan secara intensif, serta pelatihan guru hanya dilakukan pada sekolah penggerak dengan pembiayaan yang sangat tinggi. Maka berdasarkan pernyataan Doni Doesoema tersebut dapat dikatakan bahwa, uji coba yang dilaksanakan hanya pada sekolah penggerak saja merupakan suatu hal yang tidak adil dan tidak menyeluruh terhadap kebijakan sistem pendidikan di Indonesia yang sifatnya masal (nasional). Memaksakan seluruh sekolah yang ada di Indonesia untuk mengimplementasikan Kurmer tanpa pendampingan yang sama (dengan uji coba) maka hasilnya akan bias dan menimbulkan kesenjangan. Sebagai contoh, sekolah yang berada di desa atau pelosok, bahkan termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), maka konsep Kurmer tidak akan terlaksana secara konkrit sesuai harapan pembuat kebijakan.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, menurut Indra Charismiadji, seorang praktisis sekaligus pengamat pendidikan dalam Rapat Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR RI 12 April 2022 (Wahyu, 2022), bertindak sebagai salah satu narasumber berasumsi bahwa, Kurmer ini mengacu pada salah satu kurikulum operasional sekolah “mahal” di Jakarta yang kemudian menjadi dinasionalkan. Diduga, istilah- istilahnya mirip dengan sekolah yang berbasis sekolah internasional tersebut seperti, Capaian Pembelajaran, fase, modul ajar, tujuan. Jika dugaan tersebut benar, maka hal ini dapat memperkuat bentuk ketidakadilan, tidak menyeluruh dan hasil yang dicapai akan bias. Hal tersebut terkait dengan kurikulum yang diperuntukkan bagi sekolah berbasis internasional namun dipaksakan untuk dilaksanakan di sekolah dalam kategori 3T. Merupakan suatu kesenjangan yang sangat jauh dalam pelaksanaan dan keberhasilannya ketika kemudian kurikulum tersebut dinasionalkan.

Lebih lanjut lagi, Kurmer yang dapat dinilai suatu produk yang belum matang, namun dipaksa untuk “dikonsumsi” oleh anak- anak Indonesia, terlebih dibiayai menggunakan uang rakyat yang jumlahnya fantastis, ternyata keberhasilannyapun tidak dapat diukur. Menurut Dewi Kartika seorang anggota DPR RI Komisi X masih dalam Rapat Panja Kebijakan Kurikulum menyampaikan bahwa, pada tahun 2021 Kurmer diujikan kepada 2500 sekolah penggerak dan 18.800 guru penggerak menghabiskan dana sebesar 2,86 T (triliun rupiah). Jika dibandingkan

dengan kurikulum terdahulu K13, menghabiskan dana sebesar 1,46 T (triliun rupiah), maka selisihnya juga terlampaui banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, jika keberhasilannya pun tidak dapat diukur, menghabiskan uang negara (uang rakyat) dalam jumlah fantastis, akankah opini masyarakat “ganti menteri ganti kurikulum” akan terus dinormalisasi, tentu seharusnya hal tersebut harus mendapat kebijakan yang lebih tegas.

Berdasarkan segala uraian tentang kritik mengenai sistem pendidikan di Indonesia, dapat ditarik satu “benang merah” bahwa kesalahan bukan pada kebijakan baru yang di cita-citakan setiap pembuat kebijakan, namun terletak pada langkah yang seharusnya dibuat secara matang hingga kemudian diputuskan dan di implementasikan pada skala nasional. Artinya, dengan pergantian kurikulum dapat dikatakan kebijakan yang belum sepenuhnya tepat, lebih baik jika perbaikan dalam sistem pelaksanaan di mana peningkatan mutu tentang literasi, numerasi dan sains dirasa lebih tepat. Bukan seharusnya gonta- ganti kurikulum, namun Sumber Daya (SDM) yang harusnya menjadi perhatian penting untuk diperbaiki karena SDM (dalam hal ini seorang pendidik) menjadi tonggak utama dalam pencapaian tingkat keberhasilan suatu pembelajaran. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika pergantian kurikulum dalam waktu yang berdekatan, seorang pendidik belum sempat menguasai kurikulum lama, namun sudah dituntut untuk mempelajari kurikulum baru dengan segala tuntutan baik secara administratif hingga tuntutan keberhasilan dalam implementasinya, maka hal ini merupakan suatu langkah yang justru akan mendatangkan “bencana”.

### **3.2. Bentuk Implementasi Kurmer di SMP Negeri 4 Malang**

Sistem belajar mengajar di SMP N 4 Malang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka (Kurmer) sebagai panduannya, setidaknya sebagai upaya pemenuhan kebijakan pemerintah yang dilegalkan melalui petinggi sekolah. Beberapa aturan dalam Kurmer seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan peserta didik sesuai minat dan bakat, penggunaan teknologi dalam setiap pembelajaran, serta bentuk pengajaran berbasis proyek telah diupayakan oleh warga SMP N 4 Malang. Sekolah ini telah menerapkan pengelompokan kelas berdasarkan minat bakat sesuai pilihan peserta didik dari awal mereka masuk sekolah. Adapun di antaranya; kelas olimpiade, kelas PPST, kelas olahraga, kelas pramuka, kelas literasi dan kelas tahfid pada jenjang kelas VII.

Mengingat kembali sistem pembelajaran terdahulu menurut Iskandar dalam (Yani et al., 2023), guru sudah terbiasa dan sejak lama melakukan suatu proses pembelajaran satu arah dan hanya berpusat pada guru (*teacher centered*). Guru masih menerapkan sistem pembelajaran yang menganggap semua peserta didik adalah sama tanpa melihat keberagaman peserta didik. Guru mengajar dengan mengikuti karakteristik salah satu peserta didik padahal dalam satu kelas diperkirakan 20-30 peserta didik mempunyai kemampuan, keunikan dan keberagaman belajar yang berbeda- beda sehingga mengakibatkan peserta didik merasa bosan dan akhirnya motivasi belajar berkurang.

Hal tersebut bertolak belakang dengan sistem pembelajaran berdiferensiasi yang harusnya diterapkan di SMPN 4 Malang. Meskipun sekolah ini mengklaim bahwa mereka menerapkan pembelajaran yang berbasis pada Kurmer, namun pada pelaksanaannya masih menggunakan sistem lama (konvensional). Hal tersebut terlihat jelas pada kegiatan kelas, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, guru masih menerapkan *teacher centered* di mana guru bertindak sebagai pemegang komando tanpa memberikan *treatment* khusus terkait menerima keberagaman karakter dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan cita- cita Kurmer. Selain itu, tuntutan peserta didik yang seharusnya aktif jauh dari implementasi, karena berdasarkan fakta di lapangan, proses belajar mengajar masih berjalan seperti sistem lama di mana peserta didik menunggu

setiap instruksi dari guru dan melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru tersebut tanpa adanya upaya pancingan dari guru untuk membuat peserta didik aktif. Selain itu, kegiatan juga masih berpusat pada guru dan guru, hal ini terbukti dari kegiatan yang tertulis pada modul ajar yang mereka buat.

Lebih lanjut lagi, upaya pemenuhan target Kurmer melalui pembelajaran diferensiasi konten atau isi, proses, produk dan lingkungan belajar berdasarkan kesiapan, minat, dan preferensi belajar peserta didik belum terlaksana secara konkrit di kelas. Pembagian kelas berdasarkan minat dan bakat yang dimaksudkan sebagai upaya penerapan sistem pembelajaran berdiferensiasi nyatanya tidak terlaksana dengan sesuai. Misalnya, terdapat kelas olimpiade, di kelas tersebut tidak menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat atau terkhusus mencetak peserta didik sebagai ahli dalam bidang olimpiade, namun mereka tetap menerima mata pelajaran pada umumnya. Rupanya hal tersebut hanyalah sebuah penamaan kelas yang dihuni oleh peserta didik yang pintar-pintar saja. Begitu juga dengan kelas tahfid, mereka tetap menerima mata pelajaran seperti pada umumnya juga, tidak ada kelas khusus untuk mencetak peserta didik sebagai seorang ahli tahfid. Maka dengan adanya fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pembagian kelas berdasarkan minat dan bakat di SMPN 4 Malang yang diklaim sebagai upaya penerapan Kurmer belum sepenuhnya matang dan dipahami oleh pelaksana, baik dari pemangku jabatan, agen pendidik dan juga peserta didik yang berada di sekolah tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebuah bentuk hegemoni sekolah terhadap peserta didik.

Ketidakefektifan Kurmer dalam implementasinya di lapangan dapat dipahami sebagian besar karena para guru, yang bertindak sebagai agen utama dalam proses pembelajaran, masih terikat pada praktik pengajaran konvensional yang telah menjadi kebiasaan. Ini mengindikasikan bahwa upaya pengembangan guru, seperti pelatihan intensif, belum dilakukan secara memadai (Hasan, 2020). Guru sering kali hanya mengandalkan arahan dan aturan yang telah tersedia secara tertulis, tanpa mendapatkan bimbingan yang memadai untuk mengadaptasi diri dengan Kurmer. Bahkan dalam hal administrasi kelas, guru sering mengandalkan informasi yang diperoleh dari internet.

Kendala-kendala yang muncul di lapangan, yang tidak selaras dengan visi Kurmer, seringkali terjadi saat Kurmer diimplementasikan dalam suasana kelas. Para guru mungkin mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan baru yang diusung oleh Kurmer karena terikat pada cara-cara pengajaran yang sudah mapan. Hal ini menggambarkan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan tidak hanya memerlukan perubahan kebijakan, tetapi juga transformasi dalam praktik pembelajaran di tingkat guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dan komprehensif dalam memberdayakan guru dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menerapkan Kurmer secara efektif dan sesuai dengan visi yang diharapkan.

#### **4. Simpulan**

Kritik terhadap perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 (K13) menjadi Kurikulum Darurat, hingga penerapan Kurikulum Merdeka (Kurmer) saat ini, ternyata mengungkap kompleksitas yang sangat rumit. Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan, mungkin kurang mempertimbangkan secara kritis dampak-dampak yang mungkin timbul akibat perubahan kurikulum yang begitu cepat. Selain itu, para guru atau pendidik, sebagai agen eksekutif dari kebijakan tersebut, masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan Kurmer sesuai dengan visi dan tujuannya. Terlebih lagi, besarnya biaya yang diperlukan untuk implementasi Kurmer, yang sebagian besar bersumber dari uang rakyat, menjadikan peserta didik sebagai subyek eksperimen yang belum teruji secara menyeluruh. Dalam konteks studi kasus di SMP Negeri 4 Malang,

terbukti bahwa keunggulan-keunggulan yang dijanjikan oleh Kurmer, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum terwujud secara nyata. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara harapan dan realitas implementasi Kurmer. Meskipun demikian, temuan ini memberikan pandangan yang penting terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di Indonesia. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh dan kritis terhadap kebijakan pendidikan, termasuk perubahan kurikulum, serta pentingnya mendengarkan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa perubahan kurikulum selanjutnya dapat lebih baik memperhitungkan berbagai dampaknya dan lebih sesuai dengan kebutuhan serta kondisi riil di lapangan.

## Daftar Rujukan

- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darman, D. R. (2021). Kurikulum Merdeka (Kurmer) sebagai wujud komitmen bangsa dalam memperkuat pendidikan karakter di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 45-56.
- Doesoema, D. (2022). *10 Kritik ata Kurikulum Merdeka*.
- Gede Suacana, I. W. (2008). *Transformasi Demokrasi dan Otonomi dalam Tata Pemerintah Desa Mengwi Era Transisi: Perspektif Kajian Budaya*. Universitas Udayana.
- Harker, R., & Dkk. (2009). *Habitus Modal+Ranah=Praktik "Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Bourdieu*. Jalasutra.
- Hasan, M. (2020). Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka (Kurmer) di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 7(2), 85-96.
- Kasmahidayat, Y. (2010). *Transformasi Religiusitas Seni Dodod pada Masyarakat Desa Mekar Wangi Banten Selatan*. universitas Udayana.
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Rahayu, R. (2019). Reformulasi paradigma pendidikan nasional dalam implementasi kurikulum 2013. *Cakrawala Pendidikan*, 38(3), 366-377.
- Smith, A. (2020). The Impact of Curriculum Simplification on Teacher Workload: A Case Study Analysis. *Journal of Education Policy*, 25(3), 357-372.
- Sumintono, B., & Kusumaningtyas, R. (2017). *Implementasi kurikulum 2013: Evaluasi kinerja guru, kepala sekolah, dan dukungan sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadi, H. (2020). *Ketimpangan pendidikan di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Wahyu. (2022). *Memaksakan Kurikulum Merdeka, Masih Waraskah Negara Ini?*
- Wijayanti, A. P., & Kuswanto, H. (2020). Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16(1), 64-74.
- Yani, D. R., Sriwijaya, U., Susanti, R., & Sriwijaya, U. (2023). Keberagaman Peserta Didik Dalam Pemenuhan Target Kurikulum Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 2(1), 13-24.